

MUNGKINKAH PERADABAN KEMISKINAN MENGGANTIKAN PERADABAN KEKAYAAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN?

Abdon Bisei

Abstract: It has been commonly accepted that formal education is the gateway to liberated world. Through formal education school-goers learn about themselves, others and nature, and simultaneously they are enabled to establish relationship with others and nature. The ability to make these relationships will become an access to develop themselves, others and nature as a process of civilization. Hence, correlation between education and civilization becomes clear.

This paper invites us to think together and discuss relationship between education and civilization from a Christian perspective. It begins with a historical phenomenological view on education in Indonesia followed by a descriptive presentation on Ellacuria thoughts on education and *civilization of poverty*. As a closure an argumentative consideration on *preference for the poor' lifestyle* viewed from Christianity towards which our education will be put forward.

Keywords: dunia pendidikan · peradaban kemiskinan · peradaban kekayaan · mengabdikan penguasa · kaum miskin

Pendahuluan

T

anggal 16 – 20 November 2005, Gereja katolik Indonesia mengadakan Sidang Agung di wisma Kinasih, Caringin-Bogor. Sidang yang lazim

dikenal dengan sebutan SAGKI 2005 mengusung tema “*Bangkit dan Bergeraklah*”. SAGKI 2005 ini menindaklanjuti nota pastoral para wali Gereja Indonesia *Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa*.¹ Proses pengumpulan dalam SAGKI berangkat dari realitas sosial yang memperlihatkan keadaan publik situasi keresahan dialami warga bangsa ini karena kekerasan (bom Bali, tragedi Poso), formalisme agama, korupsi, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya.² Realitas ini dianalisa secara sosiologis dan disorot dari segi teologis (iman). Arah perubahan menuju peradaban baru dirumuskan berupa pertobatan menuju gerakan.

Kegelisahan bangsa dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan formal; dicatat oleh SAGKI disebabkan oleh sumber daya manusia yang lemah (Pendidikan Dasar dan Menengah), undang-undang dan sistem pendidikan nasional (Pendidikan Tinggi). Pertanyaan yang mengganggu saya adalah, apakah ada hubungan antara pendidikan formal kita di Indonesia dengan realitas keprihatinan sebagaimana dicatat oleh SAGKI? Dengan kata lain, adakah pengaruh langsung antara pendidikan formal kita dengan *output-output*; yang nampak dalam sikap brutal dan fanatik, gampang terbawa emosi dan mudah dikendalikan, suka akan kekerasan dan gemar berkelahi, anarkis dan arogan, bermental korup dan berjiwa pencuri, muda ikut arus dan gampang diprovokasi? Apakah realitas sekarang ini adalah hasil dari pendidikan formal kita di masa lalu? Pertanyaan-pertanyaan ini memiliki hipotesis utama bahwa realitas sosial bangsa Indonesia saat ini dipengaruhi oleh sistem pendidikan formal kita pada masa yang lalu. Pembuktian akan hipotesa ini hanya bisa ditemukan melalui suatu penelitian yang valid, teruji dan komprehensif.

Tulisan ini tidak mengacu ke sana tetapi hanya merupakan permenungan akan realitas bangsa Indonesia dengan panggilan kristianitas kita dalam bidang pendidikan. Tulisan ini tidak juga dimaksud untuk mengulang diskusi yang terjadi pada waktu SAGKI 2005, atau mempersoalkan rumusan-rumusan rekomendasi SAGKI 2005 dalam bidang pendidikan. Tulisan ini mau mengajak kita berpikir bersama untuk mendiskusikan lebih lanjut *keadaban baru* dalam dunia pendidikan formal yang berwawasan kristiani. Manakah *peradaban baru* dalam dunia

¹ KWI, 2004. *Nota Pastoral. Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadilan Sosial bagi semua: Pendekatan Sosio-Budaya*, KWI.

² SAGKI 2005 mencatat 17 point yang merupakan pokok masalah yang dialami bangsa Indonesia saat ini.

pendidikan yang mencerminkan nilai kristianitas kita? Sungguhkah dunia pendidikan kita pada saat ini menampakkan *peradaban baru* kristianitas kita? Pertanyaan-pertanyaan ini akan coba dijabarkan dengan fokus pada *peradaban baru* yakni *peradaban kemiskinan*. Alur percakapan dalam tulisan ini akan sangat diwarnai oleh pemikiran Ellacuría tentang pendidikan dan peradaban kemiskinan. Pertama-tama akan digambarkan situasi pendidikan kita melalui pendekatan fenomenologis-historis, kedua akan diulas secara deskriptif pemikiran Ellacuría tentang pendidikan dan peradaban kemiskinan; disusul bagain ketiga berupa pertimbangan argumentatif akan pilihan peradaban kemiskinan sebagai tanggapan kristiani atas pendidikan kita.

Awan Kelabu Dunia Pendidikan Formal Indonesia

Kapan insan pendidik dan peserta didik beserta orang tua mereka merasa nyaman menggeluti dunia pendidikan formal di Indonesia? Pertanyaan ini hampir pasti dapat dijawab bahwa tak pernah ada rasa nyaman dalam dunia pendidikan formal di Indonesia. Selalu ada kegelisahan dari waktu ke waktu. Kegelisahan ini diakibatkan, pada satu sisi, sistem pendidikan yang selalu gonta ganti undang-undang dan kurikulum setiap kali pergantian kabinet dalam pemerintahan. Sudah menjadi umum kata-kata “ganti menteri ganti kurikulum”. Sekedar contoh, ada NKK dan ‘menteri panjang’ di masa Daoed Joesoef, PSPB dan NEM sewaktu Nugroho Notosusanto, *Link & Match* dan CBSA zamannya Wardiman Jodiningrat, dan saat ini gencar dikumandangkan KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Pada sisi lain, para orang tua yang anak-anaknya ingin memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mencari tambahan keuangan dengan berbagai macam cara; menguras tabungan yang tersisa, bekerja sampingan, meminjam dari tetangga, kredit dari bank, menggadaikan apa saja; perhiasan, emas, barang-barang rumah tangga di kantor penggadaian; untuk memenuhi tuntutan keuangan dalam memasuki sekolah baru.³

Dinamika sistem pendidikan di Indonesia mungkin benar, dipengaruhi oleh selera para penentu kebijakan dalam bidang pendidikan

³ Realitas ini digambarkan secara tajam oleh Sindhunata dalam ruang “Tanda-tanda Zaman”. *Basis* Juli-Agustus 2000. Lih. Sindhunata. 2000. “Pendidikan Hanya Menghasilkan Air Mata”, *Basis*, Nomor 07-08, Tahun ke-49, Juli-Agustus (3).

namun perlu disadari bahwa selera penentu kebijakan dipengaruhi juga oleh Semangat Zaman (*zeitgeist*) yang berkembang pada waktunya. Semangat Zaman ini dapat dipahami sebagai paradigma yang mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat dan membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat terhadap realitas pada suatu masa tertentu. Sebaliknya, realitas sosial pada masa tertentu membentuk sikap dan cara bertindak masyarakat serta mempengaruhi tata nilai dan tata hidup masyarakat sehingga terjadi perubahan pada tataran paradigmatik.⁴ Semangat zaman dunia pendidikan formal di Indonesia dapat dibedakan dalam tiga tahap, yakni tahap pra-kemerdekaan hingga awal kemerdekaan, tahap Orde Baru dan tahap Orde Reformasi.

Pada tahap pra-kemerdekaan pendidikan formal di Indonesia diwarnai oleh semangat politik etik (*ethische politiek*) dari pemerintahan Belanda.⁵ Pemerintahan Belanda yang telah menjajah Indonesia dan mengeruk kekayaan Nusantara merasa wajib melunasi utang-kehormatan (*ereenschuld*) dengan mengangkat orang Indonesia ke tingkat modern melalui pendidikan ala Belanda. Pada satu pihak tindakan ini mau menunjukkan pengakuan akan kekeliruan dan niat untuk memperbaiki kesalahan dalam iklim menunaikan *tugas lubur*; pada pihak lain melalui pendidikan pemerintahan Belanda dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia terpelajar dan trampil bagi sistem industri dan perdagangan internasional untuk mengisi kas kerajaan Belanda (Mangunwijaya, 2001: 155-156). Kebijakan pemerintahan Belanda membuka pendidikan formal di Indonesia (Hindia) diwarnai juga oleh sikap diskriminatif.⁶ Sebagai contoh, diskriminasi yang terjadi pada tingkat pendidikan dasar. Bagi masyarakat pribumi (Bumiputera) diperkenalkan pendidikan formal mula-mula *Sekolah Kelas Dua* yang diperuntukkan bagi calon-calon pegawai rendah dari masyarakat biasa dan *Sekolah Kelas Satu* yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan bangsawan. Kedua sekolah ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Sedangkan bagi bangsa Eropah disediakan sekolah khusus untuk mereka dengan bahasa

⁴ Pemahaman ini diuraikan secara bebas dengan merujuk kepada tesis Berger tentang dinamika hubungan antara individu dengan masyarakat.

⁵ Uraian tentang Politik Etik pemerintahan Belanda kami merujuk pada Mangunwijaya. 2001. "Mencari Visi Dasar Pendidikan." dalam Sindhunata (ed). *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisius (155 – 174).

⁶ Uraian panjang lebar tentang pendidikan formal di Indonesia (Hindia) dapat dilihat pada, Sartono Kartodidjo (dkk). 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (124 – 154).

pengantar bahasa Belanda. Pada perkembangan selanjutnya *Sekolah Kelas Dua* diganti menjadi Sekolah Desa (*volkschool*) dengan tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sedangkan *Sekolah Kelas Satu*, untuk anak bangsawan diganti dengan HIS (*Hollandsch Inlanddsche School*) secara perlahan-lahan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada awalnya lulusan Sekolah Desa tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi, namun dalam perkembangan selanjutnya mereka bisa melanjutkan dengan syarat mengikuti kelas khusus yakni sekolah *schakel*, di mana mereka mulai belajar bahasa Belanda dan membiasakan diri dengan iklim disiplin sebagaimana sekolah kaum bangsawan (Bdk. Kartodirdjo, 1975: 124-126).

Terlepas dari semangat politik etik dan iklim diskriminasi, pendidikan formal pada masa itu telah berfungsi sebagai katalisator bagi terwujudnya dua jenis elit dalam masyarakat bumiputera, yakni elit birokrat dan elit intelektual.⁷ Kedua kelompok elit ini mempunyai status dan kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Elit birokrat memiliki status dalam masyarakat didukung oleh legitimasi politik. Mereka mengisi posisi tertentu untuk kepentingan pemerintahan Belanda, entah sebagai pejabat negara entah pula sebagai tenaga trampil pada lapangan kerja misalnya di bidang industri. Mereka ini pada umumnya merupakan kelompok yang senantiasa mendukung Belanda, berperilaku kebelanda-belandaan, dan tidak jarang menjadi kaki tangan Belanda untuk menindas bumiputera. Mangunwijaya dengan tajam menempatkan kelompok ini sebagai: “komprador pendukung sistem penjajahan” (Mangunwijaya, 2001: 156). Kelompok ini menjadi priayi baru dan menjadi alat dari Belanda untuk mengkonsolidasi dan melegitimasi kemapanan pemerintahan Belanda. Elit birokrat ini juga mereproduksi sikap dan mental Belanda untuk memperkuat dan melestarikan *status quo* kekuasaan mereka terhadap sesama bumiputera.

Elit birokrat ada yang berasal dari bangsawan dan ada juga dari masyarakat biasa. Elit birokrat yang berasal dari bangsawan bumiputera memiliki dua legitimasi politik yakni, secara primordial berdasarkan keturunan, mereka sudah memiliki pengaruhnya terhadap masyarakat bumiputera; dan berkat pendidikan Belanda, mereka menjadi pengantara dengan para penguasa dan pengusaha asing. Sedangkan elit yang berasal dari masyarakat biasa, mereka membutuhkan keterampilan teknis

⁷ Analisa terhadap dua kelompok elit ini didasarkan pada Kartodirdjo, 1975: 124-285.

tambahan, pendidikan diploma khusus yang diadakan oleh pemerintahan untuk membuktikan kemampuan mereka dan mengisi jenis pekerjaan seperti kesehatan, kehutanan, kepolisian dan militer. Makin lama elit ini makin berkembang (baik mutu maupun jumlah) dan terjadi mobilisasi sosial yang tinggi secara vertikal dengan menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.⁸ Pendidikan formal yang diselenggarakan Belanda telah menyumbang terjadinya perubahan dalam masyarakat Indonesia, suatu transformasi sosial berupa adanya kelompok priyai baru yang tidak lagi mengandalkan penghidupan mereka dari pertanian dan pabrik (tani, buruh) tetapi dari gaji tetap bulanan (pegawai pemerintahan). Elit birokrat dari masyarakat biasa yang dahulunya tidak memiliki “bawahan” berkat pendidikan mereka menjadi pejabat dan mempunyai kuasa atas sejumlah orang.

Elit intelektual memiliki legitimasi keilmuan. Meskipun tujuan sekolah dalam semangat politik etik untuk mendapat tenaga administrasi demi kepentingan Belanda, ternyata melahirkan juga sejumlah patriot dan nasionalis radikal. Inilah berkat tersamar dari pendidikan politik etik. Iklim humanisme barat yang dimiliki oleh guru-guru Belanda terwariskan kepada beberapa bumiputera (bangsawan maupun non-aristokrat) menjadi perintis kemerdekaan Indonesia. Pendidikan humanis yang terorientasi pada penghargaan akan harkat dan martabat manusia memberikan kontribusi yang besar bagi elit intelektual untuk menyadari realitas bangsanya. Berkenalan dengan dunia pendidikan yang menekankan pemikiran rasional dan argumentatif, membuat elit intelektual mulai enggan menerima primordialisme kebangsawanan dan priyai tradisional yang dihidupkan oleh pemerintah Belanda. Kualitas hidup manusia bukan lagi ditentukan oleh keturunan dan status tetapi oleh hakekatnya sebagai manusia yang bermartabat sama antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka setiap manusia hendaknya mendapatkan perlakuan yang sama.

Elit intelektual mengalami proses internalisasi (pembatinan) nilai humanis sejak berada dalam masa studi (entah yang mengikuti pendidikan di Indonesia atau yang studi di luar negeri) baik melalui perjumpaan mereka dengan guru-guru mereka yang humanis, maupun melalui perkumpulan-perkumpulan yang mereka dirikan. Begitu juga beberapa kegiatan berupa pertemuan lokal maupun internasional yang

⁸ Misalnya pada tahun 1905 bupati Tuban mengeluh karena dari 260 pegawai yang diangkat, hanya 10 orang yang berasal dari kaum bangsawan. (Kartodirdjo, 1975: 149-150).

mereka ikuti membuka wawasan mereka akan kemanusiaan universal sekaligus membangkitkan kesadaran akan identitasnya sebagai bangsa yang sedang mengalami penindasan. Berkat kesadaran itulah para elit intelektual mulai berjuang untuk mereproduksi pendidikan yang mereka peroleh dari pendidikan untuk kepentingan Belanda (administrator yang handal demi negara induk) kepada proses kemerdekaan dalam arti yang seluas-luas. Elit intelektual membongkar arus grafitasi pendidikan sebagai proses sosialisasi sikap kebarat-baratan dan pengabsolutan budaya ningrat kepada proses emansipasi diri sebagai manusia yang beradab. Kelompok ini juga mendobrak kemapanan *status quo* dan adat istiadat feodal kepada perubahan dinamis dan kesederajatan antar sesama yang merdeka.

Elit intelektual tersebar dalam beberapa bidang seperti politik, ekonomi, pendidikan dan jurnalis.⁹ Meskipun ruang aktualisasi diri dari elit intelektual ini berbeda, namun substansi yang mendasari mereka untuk berekspresi berfokus pada citra diri manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Manusia menjadi pusat dari seluruh kehidupan. Dari kelompok inilah lahirnya sejumlah tokoh *founding fathers*, yang menggagas dan membidani lahirnya Indonesia sebagai negara dan bangsa. Ketika elit intelektual ini menjadi penguasa, kebijakan mereka, termasuk juga dalam bidang pendidikan diwarnai oleh humanisme yang menekankan harkat dan martabat manusia. Mereka memiliki pengendapan yang mendalam baik pada rana intelektual maupun rana organisasi sehingga ketika mereka menjadi pemimpin, melahirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Fenomena ini berlangsung hingga tahun 1965/1966¹⁰

Dunia pendidikan pada tahun 1965/1966 hingga 1990-an diwarnai oleh semangat zaman *mengabdikan penguasa*. Dinamika dunia pendidikan formal dalam semangat zaman ini adalah ideologisasi pengetahuan dari guru – atau lebih luas lagi – dari penguasa terhadap anak didik agar peserta didik berpikir dan bersikap sebagaimana yang dikehendaki oleh guru atau penguasa. Peserta didik yang pintar adalah mereka yang menjawab pertanyaan sesuai dengan kehendak guru/penguasa. Demikian pula peserta didik yang baik adalah mereka yang bertingkalaku sesuai dengan apa yang disukai guru/penguasa.

⁹ Keterlibatan elit intelektual dapat dilihat pada Kartodirdjo, 1975: 181-318.

¹⁰ Sebagai contoh, ideologi Pancasila memperlihatkan universalitas nilai kemanusiaan. Nilai-nilai ini telah diperjuangkan dalam perguruan Taman Siswa.

Peserta didik menjadi semacam wadah berupa kepala, yang batok tengkoraknya terbuka dan siap menerima tumpahan pengetahuan dari sang guru. Guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya yang akan memenuhi otak peserta didik dengan idiologinya yang tidak lain adalah ideologi penguasa. Pada tempat ini, guru merupakan sang maha tahu segala-galanya dan peserta didik adalah sang “mahatidaktahu” yang siap menyedot pengetahuan dari guru.

Dalam semangat *mengabdikan penguasa*, dunia pendidikan formal merupakan medan untuk mensosialisasikan ideologi negara (dan hal itu berarti ideologi politik penguasa pemerintahan dan hanya itu satu-satunya). Persepsi konseptual yang bergerak dalam tataran pemikiran kehilangan kebebasannya untuk menawarkan argumentasi alternatif karena harus merujuk kepada konsep-konsep penguasa. Gaya pemikiran guru dan juga peserta didik, demikian juga masyarakat pada umumnya hanya boleh mengikuti cara berpikirnya para penguasa. Di Indonesia kita pernah mengalami masa di mana pemikiran Marx (Marxisme) dilarang di bangku-bangku sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi. Jika terpaksa menyebutnya, hanya menyinggung seadanya tanpa memahami secara keseluruhan. Dinamika ini berhubungan erat dengan faktor sejarah sosial bangsa Indonesia, kehidupan masyarakat dan segala persoalannya dan kemudian dikondisikan oleh penguasa melalui sejumlah norma, aturan dan hukum untuk mempertahankan kekuasaannya disertai dengan sejumlah ancaman dan stigmatisasi.¹¹ Mangunwijaya dengan tajam menggambarkan iklim mengabdikan penguasa dengan mengatakan bahwa:

“sistem pendidikan yang ada terkekang oleh pola tata negara dan tata masyarakat yang dibatasi oleh undang-undang dasar (yang memberi kekuasaan terlalu besar kepada pihak eksekutif), bergaya top-down dan elit militeristis serba komando serta hafalan mental pelaksanaannya, tanpa jaminan hak asasi manusia (...)” (Mangunwijaya 2001: 161).

Jadi menurut Mangunwijaya, bukan saja ruang berpikir manusia Indonesia dibatasi tetapi juga sikap mental orang dalam hidup sehari-haripun dikendalikan seperti dalam dunia militer.¹² Akhirnya

¹¹ Sejumlah buah karya Pramoedya Ananta Toer yang dikenal dengan kuartet dari Pulau Buru, terbit 1980, dilarang penerbitannya, karena dianggap menyebarkan ideologi sosialis yang memiliki kecenderungan kepada komunis.

¹² Misalnya, penggunaan pakaian seragam, latihan baris berbaris, apel untuk masuk kelas, merupakan gaya militer yang ditransfer ke dalam dunia

out-put yang dihasilkan oleh dunia pendidikan formal kita cenderung memiliki suatu kebiasaan untuk bersikap asal bapa senang, kehilangan daya kritisnya serta bergaya otoriter. Selanjutnya gaya hidup dan sikap mental para penguasa menjadi suatu daya tarik bagi peserta didik untuk diikuti, terlepas apakah *style* tersebut mencerminkan hal-hal yang positif atau negatif.¹³ Akhirnya berkembanglah dalam pikiran peserta, cita-cita mereka ke depan adalah menjadi pejabat/penguasa, yang mereka rengkuh melalui penerimaan calon pegawai negeri. Dan menjadi pegawai negeri berarti berpikir sesuai dengan ideologi penguasa yang memimpin negara.¹⁴

Dampak lain dari iklim pendidikan yang mengabdikan penguasa terdapat pada penulisan buku-buku paket untuk peserta didik. Arus dasar yang mewarnai tulisan dalam buku-buku pelajaran di sekolah adalah “cinta akan tanah air” yang kemudian bergeser semakin sempit lagi menjadi “cinta akan penguasa”. Buku-buku paket kehilangan nuansa obyektifitas ilmiahnya sebagaimana lazimnya tuntutan dunia pendidikan dan berganti menjadi alat penguasa untuk memanipulasi fakta sejarah atau kebenaran demi mempertahankan *status quo*.¹⁵ Tidak hanya sampai pada penulisan, tetapi bahkan interpretasi terhadap tulisanpun dikebiri. Model penafsiran monosemi pun dipaksakan terhadap tulisan-tulisan yang ada. Para guru dan peserta didik tidak mengungkapkan interpretasi pribadinya

pendidikan. Terdapat kesan bahwa untuk menertibkan seseorang dibutuhkan suatu kekuatan memaksa dari luar.

¹³ Habibie pada masanya menjadi idola para pelajar di Indonesia. Kita juga pernah mengalami situasi di mana segala sesuatu harus berdasarkan “petunjuk bapak presiden”. Juga ada masa di mana kepahlawanan dibangga-banggakan dan seakan-akan setiap orang baru menjadi manusia sejati kalau menjadi pahlawan.

¹⁴ Di Indonesia terdapat masa yang panjang di mana semua pegawai negeri beserta keluarga harus menjadi anggota partai politik tertentu. Meski pada beberapa tempat selalu ada kekecualian.

¹⁵ Peristiwa Serangan Umum 01 Maret 1949, dalam buku yang ditulis oleh Tim SESKOAD, 1990. Dikatakan bahwa inisiatif serangan berasal dari Let. Kol. Soeharto (Lih. SESKOAD, 1990: 195-263). Patut dicatat pula bahwa tahun 1999-2000, terjadi sejumlah diskusi hangat dari beberapa pihak di Yogyakarta, mula-mula diangkat oleh sejarawan dari Universitas Sanata Dharma, bahwa inisiatif serangan berasal dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam buku SESKOAD nama Sri Sultan selalu menyusul sesudah Let. Kol. Soeharto. Sampai saat ini belum ada penjernihan tentang hal ini.


berdasarkan kritik teks dan pendekatan hermeneutik obyektif. Semua interpretasi harus sesuai dengan kehendak penguasa. Makna yang diungkapkan oleh penguasa itulah yang menjadi makna yang benar dan harus diterima oleh semua. Hal ini sangat nampak pada buku paket PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dan PPPP (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang kemudian dijabarkan dengan butir-butir pengamalan Pancasila.¹⁶ Dalam buku-buku paket sejarah banyak tercampur antara mitos dan realitas.¹⁷

Kontrol terhadap dunia pendidikan dikembangkan oleh penguasa melalui suatu jaringan yang resmi dan bertingkat dari kabupaten hingga pusat. Kontrol ini bukan hanya melalui institusi pendidikan tetapi juga melalui orang perorangan yang dinilai oleh penguasa menjadi “juru bicara” yang mensuarakan kepentingan “bangsa dan negara”. Hal ini bisa ditunjuk, misalnya dosen-dosen Kewiraan dan Pancasila dari Perguruan Tinggi adalah mereka berasal dari tentara atau yang direkomendasikan oleh panglima ABRI/KODAM. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah, guru-guru mata pelajaran PMP harus pernah mengikuti dan lulus penataran PPPP atau mengikuti penataran guru PMP yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam zaman mengabdikan penguasa, pengendalian terhadap peserta didik justru dilakukan melalui para penulis buku paket dan guru-gurunya.

Di antara kalangan peserta didik, semangat *mengabdikan penguasa* melahirkan suasana persaingan antar peserta didik. Hal ini tercermin dalam perasaan bangga peserta didik jika mengetahui bahwa temannya memperoleh nilai lebih rendah dari padanya. Karena itu pulalah siswa memandang pengetahuan yang dia miliki atau kemampuan yang ada padanya sebagai milik yang harus dipertahankan dan disembunyikan dari orang lain. Keunggulan pribadi dengan mendapat rangking atas menjadi pintu masuk untuk dekat dengan guru atau tenar di dalam lingkup kelas dan sekolah. Mekanisme yang dibangun dalam sistem persaingan ini lebih mendukung peserta didik pada rangking atas. Mereka mendapat perlakuan khusus baik berupa hadiah sekedarnya sampai pada pemberian


¹⁶ Apakah kita dapat menafsirkan lain selain yang diungkapkan dalam buku paket?

¹⁷ Kita bisa bertanya misalnya, “Benarkah Indonesia sebagai Nusantara dijajah Belanda selama 350 tahun? Benarkah dengan bambu runcing, Indonesia menentang melawan senapan dan pelor Belanda? Benarkah Westerning membunuh sebanyak 40.000 penduduk Makasar (selama tiga bulan, mulai 11 Desember 1946)?”



beasiswa untuk mereka. Hal ini membuat peserta didik yang berprestasi semakin memiliki peluang pada banyak hal sedangkan siswa yang kurang berprestasi semakin tersisih dan lama kelamaan tidak dapat mengembangkan diri secara layak. Sedang peserta didik yang mendapatkan beasiswa membangun tangga prestasi menuju puncak dan memiliki peluang yang lebih besar untuk maju.

Semangat *mengabdikan penguasa* pada suatu pihak mengkondisikan suatu kekuatan ideologis dari tirani minoritas (yakni penguasa) tetapi serentak pada saat yang sama menyemaikan benih-benih perpecahan dalam diri peserta didik. Bibit-bibit persaingan itu lama kelamaan akan berkembang menjadi usaha-usaha untuk saling menaklukkan satu terhadap yang lain. Dalam arti tertentu bibit hukum rimba disemaikan dalam dunia pendidikan dan pada musim panen, akan dituai juga cara-cara menaklukkan satu terhadap yang lain. Siapa yang pintar dia yang berkuasa. Tidak dapat diingkari bahwa semangat *mengabdikan penguasa* membantu mempercepat proses penyelesaian pengajaran berkat 'petunjuk teknis' dan 'petunjuk pelaksanaan' dalam bentuk GBPP (garis besar program pengajaran); tetapi pada saat yang sama pola ini mengingkari realitas kemajemukan pada hampir segala bidang dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat sehari-hari. Semangat mengabdikan penguasa melahirkan keseragaman semu dan mengingkari realitas yang majemuk.




Bahwa dalam semangat *mengabdikan penguasa* terjadi penyimpangan, harus dipahami sebagai penyimpangan yang menunjukkan sisi sebaliknya dari yang dikehendaki penguasa. Ini terjadi semacam *blessing in disguise*. Dalam keadaan peserta didik semua harus menerima apa saja yang ditawarkan beberapa peserta didik terpaksa menjadi inovatif agar dapat menemukan alternatif lain agar tidak terkungkung dalam semangat zaman ini. Dalam situasi di mana semakin terjadi iklim otoriter penguasa sejumlah cendekiawan dari dunia akademisi berusaha menawarkan demokrasi sebagai solusi dalam mengatasi kebuntuan. Manakala kreatifitas dalam dunia pendidikan dipasung dengan ideologi tunggal, sekelompok kaum terpelajar mendobraknya dengan aktivitas menawarkan jalan dialog. Dan pada saat kekuasaan menggunakan tangan besi mengamankan kekuasaannya mahasiswa menggerakkan masa rakyat ke arah perubahan, reformasi. Inilah yang terjadi di Indonesia. Perubahan dari penjajahan ke kemerdekaan, dari orde lama ke orde baru, dari orde baru ke orde reformasi; dipelopori oleh komunitas-komunitas dunia pendidikan. Pendidikan tetap menjadi lokomotif perubahan sosial.

Dasawarsa 1990-an, dunia pendidikan Indonesia diwarnai oleh semangat *bisnis*. Bambang Wisudo menggambarkan semangat *bisnis* dengan kata liberalisasi. Menurut Wisudo;

“liberalisasi pendidikan mendominasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Liberalisasi pendidikan tidak hanya mengubah pengelolaan sekolah dengan model administrasi bisnis, pendidikan makin diperlakukan sebagai komoditas dan urusan privat, tetapi juga mensubordinasikan sub-sistem pendidikan untuk kepentingan pasar dan industri” (Wisudo 2005: 63).

Catatan kritis dari Wisudo ini memperlihatkan kepada kita, bahwa kepentingan bisnis dan industrialisasi telah menguasai dunia pendidikan formal di Indonesia. Pendidikan formal tingkat dasar, menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Dan pada tingkat menengah ke atas berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi peserta didik untuk terjun ke dunia kerja. Sekolah unggulan diindikasikan dengan prosentasi tinggi alumninya memasuki dunia kerja, bahkan kalau bisa direkrut sebelum menyelesaikan pendidikan. Karena kepentingan bisnis maka biaya masuk dan ongkos studi sekolah-sekolah tersebut menjadi sangat mahal. Akibatnya hanya orang-orang yang mampu membayar mahal boleh menikmati pendidikan. Pendidikan formal ternyata tidak mampu mengemansipasi manusia karena jurang sosial selalu ada. Anak buruh akan tetap menjadi buruh, anak tani akan tetap menjadi petani; sungguhpun mereka pernah menikmati dunia pendidikan sayangnya putus dalam perjalanan.


Ketika semangat *mengabdikan penguasa* pendidikan mengacu kepada birokrasi dan berpusat pada ideologisasi kekuasaan (partai politik tertentu). Pada semangat *bisnis* pendidikan bergeser kepada kepentingan pasar. (Bdk. Heryanto 2000: 89-100). Media komunikasi terutama elektronik menjadi medium untuk menjual (baca: iklan) sekolah-sekolah dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan dan janji-janji yang mustahil. Lembaga pendidikan formal tidak beda dengan iklan sampo, sabun mandi, pakaian dan gula-gula. Masyarakat dijejali dengan tawaran-tawaran dan dikondisikan untuk membeli tetapi belum tentu bermanfaat baginya. Begitulah, lembaga pendidikan formal dijual di media massa dan masyarakat “membelinya”, entah sekedar untuk membeli guna mendapatkan gelar entah juga membeli karena dianggap bergengsi memiliki gelar-gelar akademis. Hal ini disebabkan karena “pasar” membutuhkan alumni sekolah berprestasi dan gelar akademis. Kepentingan pasar menentukan arah dunia pendidikan formal. Ketika “pasar” status sosial dalam masyarakat menuntut ijazah, lahirilah



lembaga-lembaga pendidikan formal yang memberikan ijazah dengan masa studi yang singkat, tuntutan yang minimal, angka prosentasi kelulusan tinggi. Fenomena munculnya paket B/C, ujian persamaan, kelas jauh, *extension course* atau apapun namanya merupakan fakta yang tak terbantahkan adanya kepentingan “pasar” pada dunia pendidikan kita. Ketika “pasar” dalam birokrasi penguasa menuntut gelar, lahirilah lembaga pendidikan formal yang menyediakan gelar-gelar S-2, S-3. Ph.D, bagi mereka yang bisa membayarnya tanpa harus berjerih lelah mengadakan kajian dan penelitian selama bertahun-tahun. Pejabat menjadi semakin bergengsi kalau namanya ditambahi dengan gelar di depan dan di belakang.

Pendidikan formal bukan lagi sebagai ruang untuk berproses diri menjadi matang dalam hal cita, rasa karsa dan tempat untuk aktualisasi diri agar berkembang menjadi semakin manusiawi bagi peserta didik; tetapi dalam semangat *bisnis* telah menjadi pabrik instan bagi ‘robot berdarah-daging’ dunia industri dan produksi tenaga-tenaga kerja untuk kepentingan pasar. Dampaknya adalah bahwa hanya lembaga pendidikan formal yang melayani kepentingan bisnis yang dapat bertahan, semakin tahun jumlah calon peserta didik semakin membengkak; sedangkan yang tidak melayani kepentingan bisnis akan kekurangan peserta didik dan lama kelamaan ditutup. Pihak pengelola dengan mendapatkan peserta didik dalam jumlah yang besar memperoleh keuntungan finansial berkat aliran dana yang berasal dari peserta didik. Dana yang ada di samping untuk pengeluaran rutin, diinvestasi dalam bentuk pengadaan suprastruktur dan infrastruktur, termasuk fasilitas pendukung seperti taman, halaman parkir, kolam renang dsbnya; yang modalnya akan dikembalikan melalui peserta didik juga pada musim penerimaan tahun yang akan datang.

Semangat *bisnis* dalam dunia pendidikan memperlihatkan bahwa dunia pendidikan juga terseret ke dalam arus kapitalisme modern. Sistem pendidikan yang menekankan peranan pemilik modal. Kepentingan ekonomi menjadi *main stream* dalam merancang bangun pendidikan dan merumuskan strategi-strategi pencapaian secara statistik berdasarkan angka-angka. Karena itu sistem pendidikan tidak lagi dipengaruhi oleh staf pendidikan apalagi oleh kepentingan peserta didik tetapi oleh *invisible-hand* yang memiliki modal dan bisa seenaknya menentukan program studi dan ongkos studi. Staf pendidikan adalah tenaga kerja yang menggerakkan ‘mesin uang’ yakni peserta didik demi keuntungan pemilik modal.



Kapan situasi ini akan berubah? Siapa yang selalu diuntungkan dengan situasi ini? Siapa yang selalu buntung? Apakah kita masih bisa berharap bahwa sekali kelak dunia pendidikan akan sungguh-sungguh memiliki kepedulian terhadap emansipasi manusia, yakni terbebas dari kebodohan, terlepas dari kemiskinan dan keluar dari penderitaan? Apakah ada nilai kristiani yang dapat ditawarkan untuk membangun peradaban baru dalam dunia pendidikan?

Pendidikan untuk Mayoritas Rakyat Miskin

Ulasan dari pokok ini akan bersandar pada pemikiran Ellacuría tentang universitas katolik. Kami akan mengelaborasi pemikirannya secara komputatif dari karya-karyanya yang sempat kami temukan. Uraian kami akan disesuaikan dengan topik ini sehingga interpretasi subyektif akan sangat bermain peranan. Dalam interpretasi tersebut bahaya untuk menyimpang dari maksud asli pengarang akan selalu terjadi. Gagasan yang mau diangkat di sini adalah pendidikan dan peradaban kemiskinan. Sebelum melangkah ke sana sedikit berkenalan dengan Ellacu (demikian sapaan akrab Ellacuría).¹⁸

Nama lengkapnya Ignacio Ellacuría, seorang imam dari Serikat Jesuit. Lahir pada 09 November 1930 di Basque, Portugalete dekat Bilbao, Spanyol. Ellacuría tiba di El Salvador tahun 1949 sebagai seorang novis. Pendidikan teologi dan filsafatnya diselesaikan di Ekuador (Quito), Innsbruck, dan Madrid. Ellacuría ditahbiskan menjadi imam pada 26 Juli 1961.

Sekembalinya dari masa Studi (1967), Ellacuría mulai secara sungguh-sungguh membaktikan hidupnya dalam dunia pendidikan tinggi. Ia merintis dan memperjuangkan visi Universitas Amerika Tengah

¹⁸ Publikasi tentang Ellacuría untuk khalayak berbahasa Indonesia, sejauh penulis tahu, masih sangat terbatas dan kurang populer dibandingkan dengan J. Sobrino, G. Gutiérrez dan L. Bolf. Mula-mula Hartono Budi memperkenalkannya melalui majalah *ROHANI*, 1990. No. 37; (241-343) "Ignacio Ellacuría (1930-1989) Sahabat Orang Miskin Masa Kini". Budi jugalah yang menulis Ellacuría dalam *BASIS* 2002, No. 03-04, Tahun 51, Maret-April; edisi Teologi Pembebasan, "Sampai Jumpa di Surga", dan Budi 2003 *Teologi, Pendidikan dan Pembebasan*, Kanisius, Yogyakarta. Penulis lain adalah Mutiara Andalas & Henrikus Pedor, melalui artikel "Realitas Historis, Deideologi, dan Pembebasan". (*Basis* 2002. Op.cit.). Penulis menyelesaikan studi S-2 di Kentungan dengan tesis yang membahas pemikiran Ellacuría. Lih. Bisei, 2001. *Beriman dalam Realitas Konfliktif*, FTW-Kentungan, Yogyakarta. (Tesis S-2).

(UCA: Universidad Centro Americana), sebagai universitas yang menjadi lokomotif perubahan sosial dan yang berpihak kepada korban. Tahun 1974, Ellacuria mendirikan pusat studi dalam bidang teologi (CRT: Center for Theological Reflection) dan menjadi editor ECA (Central American Studies). Ia menjadi rektor UCA pada 1979. Dalam kariernya sebagai akademisi, Ellacuría mencurahkan perhatiannya secara penuh terhadap kaum miskin dan para korban, dengan kajian-kajiannya tentang realitas sosial kaum miskin El Salvador.

Ellacuría menempatkan kaum miskin dan para korban sebagai pusat meditasinya untuk berbicara tentang Tuhan dan sejarah penyelamatan-Nya. Hasil meditasinya dituangkan melalui tulisan dan dipublikasikan secara luas, yang sering berisi kritik tajam terhadap para penguasa dan sistem kapitalis Amerika Serikat. Alur pemikiran teologisnya yang bertolak dari analisa sosial atas realitas penderitaan rakyat El Salvador menempatkan dia di hadapan penguasa dicap sebagai marxis dan penyebar ajaran komunis. Namun pendiriannya tegas dan jelas, yakni sejarah keselamatan adalah keselamatan dalam sejarah. Dan sejarah bagi rakyat El Salvador (dan dunia ketiga umumnya) adalah lembaran duka dari kemiskinan mayoritas rakyat yang ditindas oleh oligarki, tetesan darah kaum tani yang dibunuh oleh kaki tangan regim yang berkuasa.¹⁹ Ellacuría mengembangkan amanat Medellin tentang realitas Amerika Latin sebagai “kelompok terbesar manusia yang hidup dalam ketidakadilan dan kaum marginal yang berteriak ke Surga” (Medellin, Justicia, No. 1, 1968). Kenyataan sejarah ini menjadi panggilan bagi kristianitas kita dan semua yang berkehendak baik untuk memikirkan, menemukan solusinya dan “menurunkan rakyat tersalib dari salibnya” (Sobrino 1990: 120).²⁰ Kristianitas kita menjadi daya (*energy*) bagi kita untuk melakukan suatu tindakan sejarah, dalam sejarah, agar sejarah keselamatan menjadi keselamatan dalam sejarah. Pendidikan dalam menjalankan fungsinya hendaknya menjadi sejarah pergumulan kaum miskin dan karena itu perlu memiliki keberanian untuk berpihak mereka (Bdk. Ellacuría, dalam Hassett 1991: 175).

Keterbukaan dan kejujurannya dalam mengatakan apa yang sungguh-sungguh nyata, membuat hidupnya selalu terancam bahaya. Beberapa kali diasingkan dari El Salvador, teror berupa surat kaleng dan

¹⁹ Hal ini dijabarkan oleh Ellacuria dalam essay soteriologisnya, 1978, “*The Crucified People*”, yang menganalogikan figur hamba Yahwe dalam Kidung Yesaya antara penyaliban Yesus dengan kaum miskin.

²⁰ *The sole object of all this talk must be to bring them down from the cross.*


telepon gelap selalu dialami oleh komunitas UCA, bantuan terhadap UCA dihentikan, kampus UCA dari tahun 1976 – 1980, digoncang dengan ledakan bom sebanyak 10 kali oleh serdadu pemerintah dari *White Warrior Union*, dan puncaknya pada tanggal 16 November 1989, pagi-pagi buta pasukan elit dari *Atlatcatl Battalion* memasuki kediaman Yesuit di kampus UCA dan menghamburi Ellacuría dan lima rekannya serta dua karyawan dengan peluru dari jarak dekat. Ada yang ditembak di tempat, yang lain diseret ke taman halaman lalu ditembak.

Pendidikan dan Kaum Miskin

Pemikiran Ellacuría tentang pendidikan, umumnya mengacu pada universitas.²¹ Tidak ditemukan mengenai pendidikan dasar atau menengah. Namun serata-serat pemikirannya dapat dielaborasi guna merefleksikan pendidikan formal secara umum. Dengan tidak bermaksud untuk mengurangi bobot pembahasannya tentang universitas, kita dapat menimbang beberapa pokok yang memiliki relevansinya langsung dengan pendidikan. Metode yang digunakan adalah membaca bahasan Ellacuría mengenai universitas sambil mengarahkan pikiran kita ke dalam kerangka dunia pendidikan.

Bagi Ellacuría pendidikan dan kristianitas adalah kenyataan dalam sejarah. Pendidikan merupakan tindakan manusia dalam sejarah untuk pembebasan dan emansipasi kemanusiaan. Dan yang paling berhak untuk mendapatkan pembebasan dan emansipasi kemanusiaan adalah mereka yang miskin, tertindas; mereka yang dipermainkan oleh struktur sosial politik yang ada, yang merupakan mayoritas rakyat. Kristianitas merupakan *energy* yang memberi inspirasi bagi kita untuk bertindak. *Energy* itu mengantar kita untuk memahami proses sejarah keselamatan sebagai sejarah yang membebaskan, yang meliputi seluruh keber-ADA-an manusia menuju kesempurnaan. (Bdk. Ellacuría dalam Hasset 1991: 208-209).


²¹ Tulisan-tulisan yang sempat terjangkau adalah: Ellacuría, The Task of a Christian University, dalam Sobrino, J; 1991. *Companions of Jesus. The Jesuit Martyrs of El Salvador*, Orbis Book, N.Y.; (141-151). Esey-esey: The Challenge of the Poor Majority; Is A Different Kind of University Possible?; The University; Human Rights, and The Poor majority. Esey-esey ini dikumpulkan oleh John Hasset & Hugh Lacey. Lih. Hasset (eds), 1991. *Towards A Society That Serves Its People: The Intellectual Contribution of El Salvador's Murdered Jesuits*, Georgetown University Press. Washington, DC.



Komponen-komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan terutama staf edukatif dan peserta didik, kemudian sistem dan institusi; bukan hanya berkerja dengan budaya, pengetahuan dan bersifat intelektual tetapi lebih dari itu harus memiliki kepedulian akan realitas sosial guna memberikan pencerahan dan transformasi sosial di mana pendidikan itu dilaksanakan. Komitmen kristiani dalam pendidikan adalah menawarkan pembebasan dari realitas penindasan, manakala terjadi ketidakadilan, dunia pendidikan menawarkan keadilan; dunia pendidikan mengedepankan cinta untuk mengatasi kebencian. Jadi pendidikan membuka kesadaran mayoritas rakyat akan penderitaan mereka dalam sejarah dan mengantar mereka keluar dari sana dengan membuat analisa-analisa teoritis dan merumuskan tindakan etik tanpa harus memusuhi orang lain. Terdapat hubungan yang erat antara pengolahan secara teoritis akan realitas sejarah dengan tindakan etis melalui praksis dalam sejarah demi transformasi sosial.

Visi kristiani dunia pendidikan dalam pandangan Ellacuría adalah bahwa dunia pendidikan harus memperhitungkan semangat injili yakni berpihak kepada kaum miskin. Keberpihakan secara injili kepada kaum miskin tidak mengandung arti bahwa hanya orang miskin yang boleh bersekolah atau juga bukan berarti bahwa pendidikan hanya berkecimpung dalam mengejar prestasi akademis yang luar biasa. Dunia pendidikan hendaknya mampu menawarkan ilmu kepada mereka yang tidak berilmu, mengusahakan keterampilan bagi mereka yang tidak trampil, bersuara bagi mereka yang tidak mempunyai suara, memberikan dukungan intelektual bagi mereka yang tidak memiliki kualitas akademis dalam mendukung dan memperjuangkan hak-hak mereka. (Bdk. Ellacuría dalam Sobrino 1991: 150. Bdk. juga Budi 2003: 80).

Dua kutub yang senantiasa menjadi pusat grafitasi pemikiran Ellacuría adalah kaum miskin dan Injil. Pada kutub kaum miskin Ellacuría memandang kaum miskin merupakan realitas rakyat yang tersalib, bukan karena dosanya tetapi dosa struktural dari luar dirinya. Pada kutub Injil, Ellacuría memandang gerak transendensi Allah yang masuk dalam ruang dan waktu (pensejarahan) untuk menurunkan rakyat tersalib dari salib. Perjumpaan antara kaum miskin dengan Injil adalah saat Kerajaan Allah. Manakalah Ellacuría berbicara tentang memperhitungkan keberpihakan secara Injili kepada kaum miskin, ia sebenarnya bicara tentang “ruang” Kerajaan Allah bagi kaum miskin. “Ruang” itu diisi melalui tindakan etik manusiawi dalam sejarah *kini* dan *di sini*. Tindakan etik itu dilakukan sebagai suatu praksis dari iman kristiani. Dalam konteks diskusi ini, dunia pendidikan dapat dilihat



sebagai salah satu bentuk tindakan etik manusia dalam sejarah untuk membebaskan mayoritas rakyat dari kebelengguan mereka.²² Tindakan etik itu dilaksanakan melalui *historic struggle* berupa kerangka pikir, model-model, proposal, kemampuan untuk bernegosiasi, yang sungguh lahir dari dunia pendidikan, demi pembebasan mayoritas rakyat menuju kepenuhan kemanusiaannya. Cara untuk menentukan tindakan etik yang tepat dari sistem pendidikan yang berpihak kepada mayoritas rakyat dalam semangat Injil adalah dengan belajar dari pengalaman dan realitas kaum miskin, baik yang dialami setiap pribadi maupun sebagai kelompok. Disitulah akan ditemukan sesungguhnya akan apa yang terjadi pada mereka dan apa yang dialami oleh mereka. Penemuan ini menjadi satu kebenaran sejati dan kebenaran itu akan membangkitkan kesadaran mayoritas rakyat akan keadaan mereka. Kesadaran menjadi anteseden dari pembongkaran kultur bisu yang yang membius mereka.

Dengan mengatakan pendidikan memperhitungkan semangat injili yang berpihak kepada mayoritas rakyat, Ellacuría membuka cakrawala pemikiran baru bahwa di satu pihak pendidikan tidak boleh mengasingkan dunia akademis dengan realitas sejarah yang ada dalam masyarakat. Dan karena itu pada pihak lain, pendidikan bukan hanya untuk pendidik dan peserta didik, tetapi juga bagi mayoritas rakyat. Konsekwensinya pada ruang kelas. Ruang kelas bukan hanya ada dalam gedung, pada sebuah kamar dengan ukuran tertentu, dilengkapi papan tulis dan kapur tulis. Ruang kelas juga adalah ruang seluas pergumulan mayoritas rakyat, ruang di mana dinamika hidup kaum miskin dan tertindas tereksplisitasi, ruang di mana peserta didik bertemu dengan sejarah nyata yang terjadi. Pendidikan menjadi pintu tiba (*point of arrival*) kesadaran yang kreatif dan kritis terhadap realitas sejarah. Kesadaran (*consciousness*) menurut Ellacuría bukan hanya merupakan hal yang melulu etik, subyektif dan kehendak tetapi juga meliputi suara hati/ hati nurani (*consience*) yang terbentuk karena pengetahuan.

Dunia pendidikan melahirkan budaya (*culture*). Ellacuría memahami budaya dari lingkup dunia pertanian dengan menggunakan istilah *cultivating*. Pendidikan sebagai tindakan penyuburan untuk menghasilkan kesuburan dan transformasi sosial. Untuk melakukan tindakan penyuburan, pertama-tama yang harus diketahui adalah kenyataan tanah yang harus diolah, struktur tanah untuk memperoleh

²² Dari perspektif “pendidikan” pembebasan dari ketergantungan dan penindasan. Dari perspektif “teologis” pembebasan dari struktur dosa dan sejarah dosa (Bdk. Ellacuría dalam Hasset, 1991: 204-205).

tindakan tepat bagaimana harus mengolah, merencanakan cara pengolahannya dan pada akhirnya melakukan tindakan penyuburan yang tepat. Tindakan penyuburan yang tepat bukan hanya akan menyebabkan unsur tanah berubah tetapi juga tanaman menjadi subur, alam menjadi bersahabat, petani makmur dan masyarakat memperoleh kesejahteraan. Dengan metafora ini Ellacuría menegaskan bahwa dunia pendidikan hendaknya menghasilkan insan-insan yang memiliki pengetahuan yang terandalan dan berkelanjutan dalam menganalisa realitas sosial, mengenali masa lalu dan memberi pijakan masa kini sebagai fundamen untuk merancang gerak ke depan menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan kata lain budaya bukan hanya berarti memungkinkan peserta didik memiliki pengetahuan sistematis yang terpuji, bukan hanya kemampuan analisa anatisipatif yang tajam, bukan pula hanya kemampuan merancang ke depan yang dapat diukur tetapi juga menjejaki jalur-jalur yang akan dilalui ke depan dan menjadikan semua peserta didik siap untuk melakukan perjalanan. Dunia pendidikan mampu menghasilkan budaya yang bisa mengubah realitas manusia dan lingkup sejarah. Dunia pendidikan melahirkan budaya yang menghasilkan nilai-nilai baru menuju tujuan kesempurnaan hidup dan menyingkap kepalsuan nilai-nilai lama. (Bdk. Ellacuría dalam Hessel 1991: 177-185).

Peradaban Kemiskinan

Ellacuría menggunakan terminologi Peradaban Kemiskinan (*civilization of poverty*) pada kutub yang berlawanan dengan Peradaban Kekayaan (*civilization of wealth*) secara dialektik. Peradaban kemiskinan hanya bisa dijelaskan dengan peradaban kekayaan. Namun istilah Peradaban Kemiskinan tidak dengan jelas didefinisikan oleh Ellacuría. Melalui esey-eseynya terutama *Utopia and Prophecy in Latin America* (Ellacuría dalam Ellacuría 1993) kita dapat menangkap maksud Ellacuría akan Peradaban Kemiskinan. Peradaban kemiskinan merupakan suatu gaya hidup manusia; pola pikir (*knowledge*) dan pola tindak (*etic*) manusia yang terfokus dan terorientasi pada solidaritas.²³ Dalam pemahaman sosiologis yang humanis Ellacuría membahasakan peradaban kemiskinan sebagai peradaban kerja, sedang peradaban kekayaan sebagai peradaban modal (*Ibid*: 314). Peradaban kemiskinan atau kerja dengan fokus dan orientasi pada solidaritas karena bagi Ellacuría:

²³ Dengan meminjam SAGKI 2005, gagasan Ellacuría dapat diterjemahkan sebagai habitus baru yang berpusat dan terarah kepada solidaritas.

“peradaban kekayaan dan modal, menunjukkan penumpukan modal pribadi terbesar pada setiap individu, kelompok multinasional, negara atau kelompok negara sebagai basis fundamental pembangunan; dan penumpukan kekayaan yang paling banyak untuk individu atau kroni-kroninya sebagai basis fundamental untuk keterjaminannya dan untuk kemungkinan konsumsi yang meningkat demi kebahagiaannya, (...) merupakan kejahatan yang paling besar dan betapapun mereka mengadakan perbaikan; hal itu tidak menyembuhkan tindakan deskruktif mereka” (*Ibid*; 315).

Dengan mengungkapkan ini Ellacuría menunjukkan bahwa orientasi pada kekayaan melahirkan gaya hidup konsumeris, hedonis dan individualis yang merupakan ancaman bagi kemanusiaan (*human being*) manusia sendiri. Manusia akan berjuang dan saling menaklukkan. Dengan demikian manusia mencidrai hakekat kekristenannya. Jadi menurut Ellacuría baik dari perspektif iman maupun sejarah, orang melihat kekayaan dan menginginkan kekayaan tersebut, memiliki kecenderungan kuat pada budaya yang tak berhati dan tindakan yang tidak manusiawi yang merupakan penghambat terbesar pada pembangunan historitas Kerajaan Allah. Usaha untuk menjadi cepat kaya telah mengarahkan manusia pada perpecahan rantai kemanusiaan dan sekaligus menciptakan kondisi manusia yang eksploitatif, menindas dan kejam. Dari segi teologis, kekayaan merupakan hambatan serius masuk ke dalam kerajaan Allah dan segi sosiologis kekayaan mengakibatkan penindasan terhadap kaum miskin. Benar bahwa kekayaan memiliki beberapa kemungkinan untuk pembebasan, tetapi dengan biaya perbudakan terhadap sesama. (*Ibid.*: 310-311).

Alasan yang dikemukakan di atas, dijadikan dasar oleh Ellacuría untuk menggantikan peradaban kekayaan kepada peradaban kemiskinan. Ada grafitasi menuju solidaritas yang besar dari penyebab penindasan, ada arus terarah pada kerjasama yang erat mengatasi situasi persaingan, tumbuh suasana persaudaraan yang rukun menggantikan sifat eksploitatif. Jadi peradaban kemiskinan bukan berarti mendewa-dewakan kemiskinan dan memitoskan penderitaan manusia, juga bukan berarti memberi resep kepada orang kaya untuk menentramkan orang miskin, apalagi menghibur orang miskin agar menerima keadaan mereka, tetapi merupakan suatu cara untuk mengatasi kemiskinan melalui solidaritas.

Peradaban kemiskinan merupakan gerak sejarah pada tata dunia baru yakni bumi baru dan surga baru.²⁴ Dalam tata dunia baru, bumi baru menata kehidupan perekonomian didasarkan pada prinsip pendinamisasian peningkatan derajat kerja. Obyek prinsipil kerja bukan terletak pada produksi modal tetapi pada penyempurnaan manusia. Kerja dipandang pertama-tama bagi Ellacuría sebagai sumber personal dan bersama bagi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar, dan sebagai suatu bentuk realisasi diri. Dalam peradaban kemiskinan tidak ada lagi eksploitasi, penghinaan dan antagonisme tetapi bekerja untuk yang lain dan ada bersama orang lain.

Bumi baru mengatur tata sosial baru bukan berdasarkan atas liberalisme kapitalis ataupun kolektivisme marksis; baik dari segi ekonomi (pasar dan negara) maupun politik (demokrasi liberal dan demokrasi sosial), ataupun “jalan ketiga” dari keduanya itu. Peradaban kemiskinan mengatur tata sosial baru dengan memberi ruang dan kemungkinan untuk setiap pribadi bagi kebebasan kreatif dan keterlibatannya dalam pengembangan martabatnya dan pada saat yang sama mengembangkan hidup bersama dalam komunitas sebagai warga masyarakat yang saling memperkaya dan menguatkan solidaritas. Melalui gagasan ini Ellacuría menekankan tata sosial baru yang menghargai setiap pribadi sekaligus kerjasama antara setiap pribadi untuk membangun hidup bersama dalam masyarakat. Individu tidak akan terserap dalam kebersamaan dan masyarakat (“negara”) tidak akan menjadi tirani bagi setiap orang. Tata sosial baru memberi ruang bagi kebebasan-keadilan-kesederajatan melalui mediasi sosial. Mediasi sosial memperbolehkan kemerdekaan individu dan bukan individualisme. Sekaligus mediasi sosial juga memperbolehkan kemerdekaan politik yakni kemerdekaan setiap individu dan setiap kelompok berhadapan dengan kekuasaan negara. Dengan demikian, “setiap orang tidak hanya sebagai individu tetapi juga sebagai masyarakat yang menjadi penjamin yang paling jelas dan efektif melawan dominasi dan penindasan dari struktur politik negara” (*Ibid.*: 321).

Tata politik baru dalam peradaban kemiskinan menurut Ellacuría adalah revolusi, dalam pengertian bagaimana menjalankannya. Ellacuría menegaskan hal itu dengan mengatakan:

²⁴ Bumi Baru dirinci oleh Ellacuría berupa: tata ekonomi baru, tata ekonomi baru, tata politik baru dan tata budaya baru. Surga Baru diuraikan melalui: Kristologi Surgawi dan Gereja Kristus.

“Revolusi yang dibutuhkan adalah revolusi yang perlu untuk kebebasan yang diperoleh dari dan mengarah pada keadilan dan perolehan keadilan yang mengarah ke kebebasan. Kebebasan ini harus melebihi pembebasan dan bukan hanya dari liberalisasi –apakah liberalisasi ekonomi atau politik– agar dengan jalan ini dapat mengatasi ‘kejahatan umum’ yang menguasai manusia dan membangun ‘kebaikan umum’ suatu kebaikan bersama yang dipahami dalam kontras dengan dosa umum dan sungguh-sungguh berasal dari keberpihakan pada mayoritas rakyat.” (*Ibid.*: 322-323)


Tata politik revolusi mengandaikan suatu gerak drastis, suatu pembalikan arah (*metanoia*) dari ketidakadilan menuju keadilan, dari penindasan menuju kebebasan. Keadilan memberi ruang bagi kebebasan, dan kebebasan menjadi peluang pada keadilan, untuk menghalau “*common evil*” agar dapat membangun “*common good*”. Dengan menawarkan ini, Ellacuría mengabaikan demokrasi liberal yang menurutnya menyem-bunyikan keuntungan dari elit kapitalis, dan tidak menerima demokrasi sosialis yang mereduksi nilai individu.²⁵ Komitmen pada tata politik peradaban kemiskinan adalah mempertahankan hak dan martabat manusia, meningkatkan keadilan dan kebebasan terutama mereka yang paling membutuhkan.

Peradaban kemiskinan menawarkan tata budaya baru dalam bumi baru yang sungguh-sungguh terbebas dari pengaruh barat agar dapat mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan sejati manusia. Budaya konsumeris yang dipromosikan melalui hiburan, mode dan iklan telah mengkondisikan orang secara keliru tentang jati diri manusia.²⁶ Sekaligus juga menciptakan suatu hiburan palsu dari jiwa yang kosong, sehingga orang kehilangan makna terdalam dari hidup.²⁷ Ellacuría menawarkan

²⁵ Ellacuría menyadari bahwa refleksi teologi pembebasan, mendukung posisi Marxis. Namun Ellacuría tidak pernah menawarkan Marxisme sebagai solusi. (Lihat Ellacuría dalam Ellacuría, 1993: 323-324).

²⁶ Pada pokok ini perlu dilihat iklan sampo dan sabun pada televisi di Indonesia menciptakan *image* keliru tentang manusia terutama perempuan, seakan-akan perempuan sejati adalah yang berambut panjang dan berkulit putih mulus. Ini suatu bentuk diskriminasi terhadap mereka yang berambut pendek, keriting dan berkulit hitam.

²⁷ Budaya mode sekarang di Indonesia seperti pengecatan rambut, pelurusan rambut, pemancungan hidung, pengencangan kulit dan bagian badan tertentu, dapat diangkat sebagai contoh.



budaya baru yang mengutamakan apa yang kodrati dan menyediakan perilaku untuk kontemplasi dan komunikasi yang aktif satu terhadap yang lain. Kedalaman rohani melalui kontemplasi akan membuahkan kesaksian keluar berupa dialog yang aktif dengan masyarakat demi perubahan sosial.

Surga Baru dalam peradaban kemiskinan adalah Surga yang nyata dalam sejarah. Surga bukan tempat akhir tetapi tempat manusia secara perlahan-lahan mensejarahhi sejarah keselamatan, realitas di mana kehadiran Allah terlihat di tengah manusia dan struktur sosial manusia, di mana Kristus kepercayaan menjadi nyata dalam Kristus historis, melalui tindakan manusia.

Tindakan manusia yang percaya, adalah tindakan Gereja baru, Gereja sebagai sakramen keselamatan dunia. Sebuah Gereja yang senantiasa diterangi oleh Roh Pembaharu dan yang peka terhadap tanda-tanda zaman. Gereja yang demikian dalam Surga Baru adalah Gereja yang berpihak kepada kaum miskin, di mana manusia baru tinggal dalam rumah yang ramah dan tidak dalam keterpurukan.

Peradaban Kemiskinan dalam Dunia Pendidikan

Sampai di sini kita telah menelusuri secara fenomenologis sejarah pendidikan di Indonesia, serta mendiskusikan gagasan Ellacuría tentang pendidikan dan peradaban kemiskinan. Dari penelusuran fenomenologis sejarah, kita mengetahui bahwa pendidikan membawa transformasi sosial dalam masyarakat Indonesia. Setiap periode dengan semangat zamannya telah memberi untung kepada sekelompok kecil orang pada satu pihak dan mayoritas rakyat menjadi buntung pada pihak lain.

Dari gagasan Ellacuría tentang pendidikan kita dapat menemukan visi dasar pendidikan kristiani yaitu dunia pendidikan hendaknya memperhitungkan semangat injili dengan berpihak kepada kaum miskin. Tentang peradaban kemiskinan, Ellacuría menawarkan suatu revolusi, yang bersifat mendesak terjadi dalam sejarah berupa Solidaritas menggantikan peradaban kekayaan.


Pada bagian ini saya ingin mendiskusikan pertanyaan pada judul artikel, mungkinkah peradaban kemiskinan dapat menggantikan peradaban kekayaan dalam dunia pendidikan formal, lebih-lebih di Indonesia. Pertama-tama akan diungkapkan argumen penolakan terhadap peradaban kekayaan, kemudian disusul dengan argumen pilihan akan peradaban kemiskinan dalam dunia pendidikan. Dengan

mengungkapkan argumentasi penolakan terhadap peradaban kekayaan dan pilihan pada peradaban kemiskinan, tidak dimaksud untuk mengutuki masa lalu tetapi mengajak untuk memulai suatu yang baru, *begin a new*; tidak untuk menyesali apa yang sudah terjadi tetapi untuk mempertanyakan kembali secara kritis apa yang selama ini dirasa paling benar dan paling tepat oleh dunia pendidikan kita.

Realitas yang mencerminkan peradaban kekayaan dalam dunia pendidikan bisa dicermati pertama-tama melalui ongkos studi yang mahal, yang disyaratkan oleh lembaga pendidikan terhadap para calon peserta didik. Biaya yang melangit itu katanya diperuntukkan bagi gaji-gaji, ekstra kurikuler ini-itu, rupa-rupa kostum dan jenis-jenis seragam, pengembangan bakat dan minat A-Z, dan sebagainya. Apakah benar bahwa pendidikan bermutu itu harus selalu mahal masih patut didiskusikan. Manakah indikator yang menunjukkan mutu dari suatu lembaga pendidikan pantas dipertanyakan. Namun satu hal yang jelas, dampaknya dapat dipastikan, yakni bahwa hanya kelompok menengah ke atas saja yang dapat menikmati pendidikan. Dalam situasi kita di Indonesia, kelompok ini adalah kelompok minoritas. Mayoritas rakyat tidak sempat menikmati pendidikan formal, walaupun sempat, pada kelompok ini angka *drop-out*-nya tinggi.²⁸ Menurut laporan dari BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1976 sekitar 40,8% dari total penduduk, tahun 1993 menjadi 11,3% dari total penduduk. Krisis ekonomi tahun 1997, menyebabkan penduduk miskin Indonesia pada tahun 1998 sekitar 39,1% dan diperkirakan pada tahun 1999 meningkat menjadi 73 % di daerah perkotaan dan 63% di daerah pedesaan (Budi, 2003: 25-26). Keadaan kemiskinan ini jika memperhitungkan lagi dengan dampak kenaikan BBM beberapa waktu lalu, wabah flu burung, harga pupuk melambung, bencana alam dan sebagainya, maka prosentase penduduk miskin di Indonesia pada saat ini (2006) semakin mendekati angka 80%.²⁹ Ironisnya pada saat yang sama di mana


²⁸ UNESCO melaporkan angka putus sekolah di Indonesia pada tahun 2004: SD/MI: 650.000 orang, SMP dan yang sederajat 100.000 orang, SMU dan yang sederajat 45.000 orang. Jumlah mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya sebanyak 500.000 orang (Kompas, 10 Oktober 2005: 12).

²⁹ Data yang eksak perlu penelitian yang valid dan komprehensif. Angka ini hanya merupakan asumsi berdasarkan beberapa fenomena yang sempat dilansir oleh media masa. Sesudah kenaikan BBM 30 Maret 2005, dan terutama kenaikan lebih dari 100% pada 1 Oktober 2005, koran-koran nasional seperti *Kompas*, *Media Indonesia*, koran lokal Papua seperti *Cendrawasih Pos* memberitakan



mayoritas rakyat bergulat dengan masalah kemiskinan, para pejabat (baik eksekutif maupun legislatif pada jenjang daerah dan nasional), sibuk memperjuangkan kenaikan gaji mereka. Para pejabat ini adalah mereka yang masa lalu menikmati pendidikan dan menyelesaikannya pada tingkat menengah atau Perguruan Tinggi. Secara logis, ongkos studi yang mahal hanya dapat dijangkau oleh minoritas rakyat. Realitas ini memperlihatkan bahwa peradaban kekayaan dalam dunia pendidikan hanya akan menguntungkan 20% dari rakyat Indonesia.

Kelompok mayoritas rakyat yang untung-untungan memasuki dunia pendidikan formal, belum tentu bisa menyelesaikan pendidikannya. Keadaan mereka yang miskin berpengaruh terhadap pemberian nutrisi. Nutrisi yang minimal menyebabkan kemampuan menyerap proses belajar mengajar menjadi rendah, konsentrasi berkurang akibatnya prestasi belajarnya makin lama makin menurun. Belum lagi anak-anak miskin pada umumnya memikul beban ganda yakni mengikuti pendidikan formal sekaligus mencari nafkah kehidupan. Kondisi ini menyebabkan peserta didik dari kelas masyarakat di bawah garis kemiskinan selalu mengantuk di kelas, sedangkan di rumah tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pada tingkat pendidikan dasar jangan pernah bermimpi bahwa peserta didik akan mendapat pendampingan dari orang tua mereka waktu belajar apalagi memberi pelajaran tambahan melalui kursus-kursus. Orang tua sudah tergadai waktunya dalam mencari nafkah, dan hasil yang diperoleh tidak cukup untuk mengongkosi hidup. Pada tingkat pendidikan menengah anak-anak miskin lebih mandiri karena terpaksa oleh keadaan. Litania penderitaan kaum miskin masih bisa diperpanjang dengan memperhitungkan keadaan perumahan mereka, kondisi kesehatan jasmani dan lingkungan mereka. Tidak heran di kalangan mereka timbul



bahwa angka kemiskinan rakyat Indonesia/Papua bertambah. Selama sebulan berita tentang dampak kenaikan BBM dan kompensasi melalui SLT (Subsidi Langsung Tunai), dilaporkan setiap hari, entah dalam skala nasional entah secara parsial daerah-daerah. Isinya antara lain, angka kemiskinan bertambah, daya beli masyarakat rendah, membengkaknya belanja keluarga, protes atau dampak negatif dari SLT, angka pengangguran tinggi, inflasi naik dan harga kebutuhan pokok melambung. sejumlah perusahaan kecil gulung tikar, beberapa perusahaan besar mulai mengadakan rasionalisasi karyawan istilah lain untuk PHK, menambah angka jumlah pengangguran. Kondisi ini berdampak pula pada PNS dan TNI golongan rendah. BPS mencatat jumlah penerima SLT se Indonesia sebanyak 16.355.068 keluarga. (Lih. www.kompensasisbbm.com, 27 April 2006, 07.32).

sikap apatis terhadap pendidikan formal. Jika pada pendidikan dasar saja mereka tidak mampu maka kemungkinan untuk jenjang pendidikan lanjut atau universitas hanyalah merupakan utopia belaka.

Kedua, penolakan akan peradaban kekayaan dalam dunia pendidikan formal didasarkan juga pada kenyataan bahwa pendidikan formal telah menciptakan jurang sosial antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin, yang kaya semakin terjamin dan yang miskin semakin menjadi miskin. Asumsi di atas bahwa penduduk miskin di Indonesia sekitar 80% atau hanya 20% dari total penduduk Indonesia yang kaya. Jika asumsi itu dihubungkan juga dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal maka dapat dikatakan bahwa yang berkesempatan luas untuk mengikuti pendidikan formal hanya 20%. Pendidikan formal sebagai upaya untuk mencapai kemampuan dasar emansipasi diri melalui membaca, menulis dan berhitung, tidak dialami oleh mayoritas rakyat. Dalam jangka waktu yang panjang keadaan ini berpengaruh sangat buruk terhadap mereka. Peluang untuk emansipasi diri dalam masyarakat semakin sempit. Pemahaman diri dan lingkungan, keterbukaan wawasan dan pengetahuan sebagai jembatan menuju pembebasan yang diperoleh melalui pendidikan formal, hilang gemanya di telinga mayoritas rakyat. Peluang emansipasi diri entah secara sadar atau tidak, direbut oleh minoritas yang kaya. Gema pembebasan hanya dapat ditangkap oleh segelintir orang yang mampu membayar mahal untuk mengikuti pendidikan formal.

Pertengahan tahun 1990-an, ramai diperbincangkan di Indonesia pengembangan Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM. Perbincangan ini didasari oleh pemikiran bahwa sumber daya manusia yang bermutu merupakan modal dasar bagi pembangunan bangsa. Modal bukan lagi berupa uang atau hal-hal material lainnya, tetapi kemampuan fisik dan intelektual manusia yang menentukan perkembangan suatu bangsa. Sambil tetap menyadari bahwa cara berpikir demikian mencerminkan peradaban kekayaan dari dunia kapitalis, diskusi ini mengantar kita pada pengakuan bahwa cara yang paling bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu adalah melalui pendidikan formal. Melalui pendidikan formal seseorang menentukan emansipasi diri dan pembebasannya menuju transformasi sosial. Namun karena hanya sebagian kecil yang menikmati pendidikan formal maka minoritas itulah yang mampu mengembangkan diri yang pada akhirnya merekalah yang menguasai mayoritas rakyat. Minoritas ini yang menentukan gerak emansipasi diri dalam masyarakat

dan posisi kunci bagi pembebasan diri dan masyarakat, melalui kebijakan yang mereka tentukan.

Mengikuti kerangka pikir peradaban kekayaan dengan indikasinya pada ongkos studi yang mahal, dan karenanya hanya sebagian kecil orang yang dapat menikmati pendidikan, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa hanya minoritas yang menentukan gerak hidup mayoritas rakyat. Dan jika orientasi minoritas adalah kekayaan maka minoritas itu akan semakin kaya dan berkuasa sedangkan mayoritas rakyat semakin miskin (ilmu dan harta) dan senantiasa berada dalam penindasan. Realitas ini akan menciptakan ketidakadilan yang abadi dan distribusi kejahatan di antara mereka yang beruntung terhadap mayoritas rakyat.

Ketiga, penolakan peradaban kekayaan dalam dunia pendidikan formal didasarkan juga pada kenyataan bahwa pendidikan formal menciptakan diskriminasi antara mereka yang beruntung dengan mereka yang miskin. Fenomena historis pendidikan formal di Indonesia didominasi oleh keberpihakan kepada mereka yang beruntung atau kaya. Diskriminasi pada zaman Belanda secara legal diatur melalui *Stbl* 1914. No 359, yang mengatur kategori mereka yang boleh memasuki sekolah bermutu; yakni anak-anak dari golongan bangsawan, tuan tanah, orangtuanya berpendidikan, dan berpenghasilan Fl. 100/bulan (Kartodidjo 1975: 146).³⁰ Pada zaman *Mengabdikan Penguasa* dan iklim *Bisnis*, meskipun secara legal dikatakan bahwa semua orang berhak atas pendidikan (bdk. UUD '45; fs. 31) perlakuan penyelenggara pendidikan formal dari setiap jenjang dan jenis; mengkondisikan keberpihakan kepada mereka yang beruntung. Hal ini bisa ditunjuk dengan persyaratan penerimaan siswa/mahasiswa baru berupa biaya yang mahal, NEM (Nilai Ebtanas Murni) atau IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang tinggi. Pendidikan formal yang bermutu dengan pendidik yang berbobot, kegiatan belajar mengajar yang berdisiplin, ekstra kurikuler dengan penyaluran minat dan bakat minat yang terakomodir, dan fasilitas yang memadai; dinikmati oleh minoritas rakyat beruntung.³¹ Sedangkan mayoritas rakyat yang miskin mengisi sekolah-sekolah yang sering diberi

³⁰ Penghasilan Fl.100/bulan adalah gaji dari asisten wedana. Kepala wedana adalah kepala distrik. Mungkin bisa dibandingkan sekarang dengan gaji seorang asisten kepala distrik.

³¹ Pada masa sekarang adanya keberpihakan kepada mereka yang lebih beruntung terungkap melalui penyelenggaraan seperti Sekolah Unggulan, SMA Plus, Sekolah Percontohan, kelas pintar; dan sebagainya.


lebel sebagai “sekolah buangan”.³² Istilah “sekolah buangan” sungguh sangat tepat, karena sekolah-sekolah ini menampung mayoritas rakyat yang terlupakan dalam kebijakan pendidikan, rakyat yang terbuang dari sistem pendidikan. Mereka dibuang entah tidak memenuhi syarat memasuki sekolah terpilih atau terpaksa memilih “sekolah buangan” lantaran tidak mampu menjangkau yang favorit. Mereka dibuang oleh mekanisme penerimaan siswa baru, mereka dibuang karena mereka miskin, mereka dibuang karena mereka bodoh dan kemudian mereka juga akan dibuang dari dunia kerja karena berasal dari sekolah buangan. Dan –jangan sampai– pada akhirnya mereka juga akan dibuang (dilupakan orang, tidak dihitung) ketika menemui kematian.

Outcome dari *output* sekolah-sekolah favorit memperlihatkan mobilitas vertikal yang signifikan sedangkan sekolah buangan jarang sekali terjadi mobilisasi itu. Seorang anak buruh kasar bersekolah di “sekolah buangan” kemungkinan kemudian hari ia tetap menjadi seorang buruh kasar mengikuti jejak orang tuanya. Sebaliknya seorang anak dari keluarga yang beruntung bersekolah di sekolah favorit kemungkinan kemudian hari memiliki status sosial ekonomi lebih dari–atau setidaknya–tidaknya sama dengan–orangtuannya.

Realitas ini menunjukkan bahwa peradaban kekayaan dalam pendidikan formal menciptakan diskriminasi yang permanen antara mereka yang beruntung dengan mereka miskin dengan peningkatan keuntungan pada mereka yang beruntung dan penggerusan penderitaan bagi mayoritas rakyat yang miskin. Mereka yang berasal dari lingkungan miskin, yakni mayoritas rakyat hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk sekolah favorit atau terpaksa meninggalkan sekolah.


Setelah mendiskusikan argumen penolakan peradaban kekayaan, kita melangkah pada pertimbangan untuk menawarkan peradaban kemiskinan dalam dunia pendidikan formal. Tidak dapat disangkal bahwa dunia pendidikan telah melahirkan sejumlah kaum cerdas pandai, beberapa birokrat unggul dan penguasa ternama, segelintir pengusaha sukses dan pelaku bisnis yang handal, sekelompok teknokrat canggih dan teknisi trampil. Namun tidak dapat disangkal juga bahwa dunia pendidikan formal yang berkiprah di Indonesia sejak zaman *ethische politiek* hingga *semangat bisnis* sekarang ini belum sepenuhnya menghasilkan pembebasan dan emansipasi mayoritas rakyat dalam hidup mereka. Keberhasilan yang diperoleh segelintir orang dibayar dengan

³² Kadang nampak juga melalui kebijakan seperti penyelenggaraan, Kelas Jauh, Kelas Sore, Sekolah Cabang; dan sebagainya.



mayoritas rakyat Indonesia ini yang hidupnya makin lama makin terpuruk. Realitas ini membutuhkan suatu revolusi dalam bidang pendidikan. Suatu pembongkaran habitus lama dan membangun habitus baru, dari peradaban kekayaan menuju peradaban kemiskinan.

Peradaban kemiskinan tidak sama dengan mendewa-dewakan kemiskinan dan memitoskan penderitaan. Peradaban kemiskinan juga tidak berarti melarikan diri dari kenyataan miskin ke dalam sikap pasrah menerima, serta merohanikannya. Peradaban kemiskinan berarti membongkar orientasi pendidikan yang selama ini berpihak kepada orang kaya dan mereka yang beruntung menjadi berpihak kepada mereka yang miskin dan tertindas. Fokus perhatian adalah merombak prioritas kekayaan dan modal dalam pembentukan (cara pandang dan cara menilai) manusia ke dalam prioritas kerjasama dalam karya. Motivasi yang mendorong pembongkaran tidak didasarkan atas rasa benci tetapi atas dasar cinta dan belas kasih, semuanya dilihat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Dalam bahasa Injili, pembongkaran didorong oleh rasa cinta terhadap sesama karena semua adalah anak-anak Allah dan bukan musuh yang harus dihancurkan. Nama lain dari peradaban kemiskinan adalah solidaritas.




Argumentasi pilihan kepada peradaban kemiskinan atau solidaritas, pertama-tama, peradaban kemiskinan menekankan pada humanisme universal. Manusia sebagai individu memiliki martabat yang luhur. Keluhuran martabat manusia bukan terletak pada apa yang dia miliki tetapi secara kodrati merupakan hal yang melekat pada dirinya (*an sich*). Manusia bukan merupakan sumber penerimaan devisa dalam pendidikan formal dan obyek garapan kelompok bermodal yang menyelenggarakan pendidikan. Revolusi dunia pendidikan dengan mengusung humanisme universal akan menciptakan ruang dalam dunia pendidikan tidak hanya kepada mereka yang beruntung tetapi kepada siapa saja, baik yang kaya maupun yang miskin, sama-sama menikmati pendidikan yang bermutu. Dalam iklim humanisme universal akan tumbuh kesadaran tentang tanggungjawab bersama, kepentingan umum dan minat akan perdamaian menggantikan persaingan, penaklukan dan permusuhan. Semangat humanisme universal memungkinkan berkembangnya rasa percaya diri, perilaku inovatif dan kreatif menggantikan perasaan minder, mental menjiplak dan budaya mapan. Humanisme universal menyuburkan suasana demokrasi, keterbukaan dan perubahan menggantikan situasi yang otoriter, sikap fanatik dan fundamentalis.

Pada akhirnya dengan humanisme universal dalam dunia pendidikan formal diharapkan akan “terangkatnya manusia dari kemiskinan hingga ia memperoleh apa yang dibutuhkannya untuk hidup; tersingkirnya kendala-kendala sosial, melebarnya cakrawala pengetahuan, tercapainya penyempurnaan dan kebudayaan” (PP 21). Pada poin ini diskusi atas pilihan peradaban kemiskinan dalam bidang pendidikan diarahkan kepada realitas mayoritas rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi mereka juga adalah manusia yang berhak untuk terbebas dari keterpurukan; yakni dari kemiskinan kepada keterjaminan, dari terpinggirkan kepada keterlibatan, dari buta huruf kepada melek huruf dan dari pembodohan kepada pemerdekaan. Ada korelasi dialektika yang erat sekali antara keempat hal ini. Peradaban kemiskinan yang menekankan humanisme universal dalam dunia pendidikan merupakan pintu menuju pembebasan.

Kedua, peradaban kemiskinan menekankan persaudaraan. Nilai yang paling kuat dihayati oleh orang-orang miskin dan tertindas adalah rasa senasib dan sepenanggungan. Kuatnya perasaan senasib sepenanggungan mendorong mereka untuk bersatu pada jika menghadapi ancaman dari luar. Dalam dunia pendidikan formal, persaudaraan diwujudkan melalui perlakuan proporsional di antara peserta didik. Relasi yang dibangun di antara *civitas academica* bukan berdasarkan pada *homo homini lupus* dan mentalitas penaklukan tetapi pada kepedulian terhadap orang lain agar saling memerdekaan. Suasana pendidikan formal bukan lagi suasana kompetisi untuk merebut ranking satu, atau juara umum sekolah, tetapi saling membangkitkan kemampuan yang dimiliki oleh semua pihak. Setiap orang menyediakan dirinya bagi yang lain sehingga terjadi upaya saling memberi dan saling menerima pemahaman, pengertian dan pengalaman satu terhadap yang lain. Revolusi dunia pendidikan dengan mengedepankan persaudaraan di mana tercipta ruang untuk saling mendorong agar semakin berkembang karena semua menawarkan pengalaman hidup mereka masing-masing. Semua pihak baik peserta didik maupun pendidik menjadi guru satu terhadap yang lain, kawan seperjalanan yang mencari kebenaran.

Persaudaraan dalam dunia pendidikan formal dapat diibaratkan dengan suasana di dalam keluarga. Semua orang saling mengenal satu sama lain dan mengerjakan apa yang dapat dikerjakan tidak melebihi kemampuan yang dimiliki. Yang kuat membantu yang lemah, dan pada saat tertentu yang cepat memperlambat laju jalannya agar seiring sejalan dengan yang belum kuat berlari. Dalam dunia pendidikan formal berarti terjadi usaha saling bantu membantu untuk memajukan diri satu dengan



yang lain. Setiap orang memiliki kemampuan serta irama yang berbeda dalam memahami satu persoalan. Maka iklim lomba menjadi juara satu tidak pada tempatnya dalam peradaban kemiskinan oleh karenanya perlu diganti dengan penghargaan (*reward*) berupa pujian atas setiap jengkal kemajuan yang peserta didik alami dalam pendidikan. Peradaban kemiskinan memperjuangkan persaudaraan dalam dunia pendidikan merupakan jalan menuju cinta kasih sosial, kepedulian terhadap *the others*.

Ketiga, peradaban kemiskinan memupuk kerja sama. Prinsip kerjasama didasarkan pada kenyataan bahwa manusia saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan meliputi dimensi masyarakat luas yakni antara minoritas yang kaya dengan mayoritas rakyat yang miskin, antara kelompok menengah dengan kelompok yang kurang beruntung, dan diantara mayoritas rakyat miskin. (Bdk. SRS. 39). Dalam dunia pendidikan formal hal ini mengandung arti bahwa ongkos pendidikan yang mahal dibebankan kepada mereka yang kaya agar dengan penuh tanggungjawab mereka melayani mayoritas rakyat yang miskin. Kelompok-kelompok menengah seperti kaum pendidik, alim ulama, dsbnya; mereka tidak boleh mementingkan diri sendiri tetapi memperjuangkan kepentingan bagi mayoritas rakyat, agar pendidikan bermutu diperuntukkan bagi semua orang. Di antara mayoritas rakyat miskin, kerja sama berarti bersama-sama mengatasi sikap pasif menerima nasib dan mulai berjuang untuk menuntut hak-haknya yang sah dalam bidang pendidikan.

Peradaban kemiskinan dalam dunia pendidikan formal mengusulkan kerja sama justru menghargai kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh manusia. Bahwa masing-masing orang dapat memberi kontribusinya dalam dunia pendidikan agar setiap orang mencapai pendewasaan dan emansipasinya dalam masyarakat. Kerja sama tidak sama dengan “pelemparan” tanggungjawab kepada orang lain, tetapi mengandung prinsip subsidiaritas, apa yang sudah dapat ditangani oleh tingkat mayoritas rakyat miskin tidak boleh diambil alih oleh kelompok menengah atau mereka yang lebih beruntung. Ada batas-batas tugas, tanggungjawab, dan kewajiban masing-masing. Peradaban kemiskinan mengutamakan kerja sama dalam dunia pendidikan merupakan jalan menuju kesejahteraan bersama.

Keempat, peradaban kemiskinan didasarkan atas iman kristiani pada peristiwa inkarnasi. Peristiwa inkarnasi dilihat sebagai peristiwa transendensi Allah ke dalam sejarah. Allah yang ada di luar ruang dan waktu mentransendensi diri-Nya memasuki sejarah umat manusia. Allah terlibat dalam sejarah menjadi daging dalam dunia. Yesus historis adalah


Allah yang menjadi daging dalam dunia, Allah melibatkan diri dalam sejarah agar sejarah penderitaan menjadi sejarah keselamatan. Yesus historis, menunjukkan kepedulian terhadap mayoritas rakyat miskin dengan keberpihakan yang jelas kepada mereka. Keberpihakan kepada mayoritas rakyat miskin merupakan historisasi Kerajaan Allah.

Penutup:


Peradaban kemiskinan dalam dunia pendidikan, mungkinkah di Indonesia?

Secara sederhana dan fundamental dapat dijawab **MUNGKIN**. Jawaban ini merujuk kepada landasan konstitusi negara, yakni UUD'45, baik Pembukaan maupun fasal 31 dan fasal 33. Tetapi menjadi rumit pada tataran praksis jika tidak ada revolusi dalam dunia pendidikan kita dan dalam tata politik kita. Maka pada akhir diskusi ini saya ingin membuat pengandaian-pengandaian:

1. Andaikan gaji pejabat sebesar Rp 100.000.000,-/bulan dipotong sebagian untuk kepentingan pengembangan infra struktur pendidikan.
2. Andaikan gaji anggota DPRD yang baru setahun bertugas Rp 7.500.000,-/bulan dikurangi untuk menaikkan gaji guru SD yang sudah bertugas selama 15 tahun sebesar Rp 1.500.000,-
3. Andaikan mobil dinas pejabat "BMW" diganti dengan "Kijang" kapsul, dana lebihnya disubsidikan bagi nutrisi orang miskin.
4. Andaikan pajak-pajak orang kaya tidak dimanipulir sehingga tersedia dana untuk ongkos studi mayoritas rakyat.
5. Andaikan gedung-gedung pencakar langit ditiadakan dan dananya bagi pelayanan kesehatan rakyat miskin.
6. Andaikan proyek *real estate* diarahkan untuk pembangunan perumahan rakyat.
7. Andaikan lapangan golf yang maha luas dijadikan pengembangan usaha perkebunan padat karya rakyat.
8. Andaikan ada semangat keteladanan nasional dalam memperjuangkan hidup sederhana.
9. Andaikan solidaritas bukan hanya sekedar slogan tetapi nyata dalam hidup.


- 
10. Andaikan kita masih punya hati seperti Aga Khan.
 11. Andaikan kita masih melirik SD Mangunan (Yogyakarta), Madrasah Aliyah (Bingkat), Qarryah Thayibbah (Salahtiga), SD Hikmah Teladan (Cimahi).

maka akan ada selebrasi kemanusiaan, dalam dunia pendidikan, tidak ada lagi hanya orang kaya yang menikmati pendidikan, tetapi semua, kaya – miskin, putih – hitam, lurus – keriting; akan menikmati pendidikan bermutu. Inilah peradaban kemiskinan.



Kepustakaan

- Budi, Hartono. 2003. *Teologi, Pendidikan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ellacuría, Ignacio. 1991. The Task of a Christian University, dalam Sobrino (eds). *Companions of Jesus. The Jesuit Martyrs of El Salvador*, New York: Orbis Book (147-151).
1991. The Challenge of the Poor Majority, dalam John Hassett & Hugh Lacey, *Towards a Society that Serves Its People*. Washington: Georgetown University Press (171-176).
1991. Is A Different Kind of University Possible, dalam John Hassett & Hugh Lacey, *Towards a Society that Serves Its People*. Washington: Georgetown University Press (177-207).
1991. The University, Human Rights, and the Poor Majority, dalam John Hassett & Hugh Lacey, *Towards a Society that Serves Its People*. Washington: Georgetown University Press. (208-219).
1993. The Crucified People, dalam Ignacio Ellacuría & Jon Sobrino (eds.) *Mysterium Liberationis*. New York: Orbis Books (580-603).
1993. Utopia and Prophecy in Latin America, dalam Ignacio Ellacuría & Jon Sobrino (eds.). *Mysterium Liberationis*, New York: Orbis Books (288-327).
- Ellacuría, Ignacio & Jon Sobrino (eds.). 1993. *Mysterium Liberationis*. New York: Orbis Books.
- Hassett, John & Hugh Lacey (eds). 1991. *Towards a Society that Serves Its People: The Intellectual Contribution of El Salvador's Murdered Jesuits*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Heryanto, Ariel. 2000. "Industrialisasi Pendidikan", dalam *Basis*, Nomor 07-08, Tahun ke-49, Juli–Agustus (89-100).
- KWI, 2004. *Nota Pastoral. Keadaban Publik: Menuju Habitus Baru Bangsa. Keadilan Sosial bagi Semua: Pendekatan Sosio-Budaya*. Dokpen KWI.
- Mangunwijaya. 2001. Mencari Visi Dasar Pendidikan, dalam Sindhunata (ed). *Pendidikan. Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisius.

- 
- SAGKI 2005. 2005. *17 Prioritas Masalah. Baban Persidangan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia 2005*. (Wisma Kinasih–Caringin–Bogor 16 s/d 20 November 2005).
- Sartono Kartodidjo (dkk.). 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Sindhunata, 2000. “Tanda-Tanda Zaman. Pendidikan Hanya Menghasilkan Air Mata”, dalam *Basis*, Nomor 07-08, Tahun ke-49, Juli–Agustus.
- Sobrinio, J. 1991. *Companions of Jesus. The Jesuit Martyrs of El Salvador*. New York: Orbis Book.
- Wisodo, P. Bambang. 2005. “Gereja Katolik dan Pendidikan di Tengah Arus Liberalisasi Pendidikan”, dalam *Kumpulan Makalah dan Bacaan Pelengkap Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia* (Wisma Kinasih–Caringin–Bogor 16 s/d 20 November 2005).
- 